



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : YUDI YOS ELVIN
- Jabatan : KEPALA
- NHK : 136327

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 690.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/158 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
- Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 4.000.000

- MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 800.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.885.630

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 698.685.630

**III. HUTANG** Rp. 274.916.000

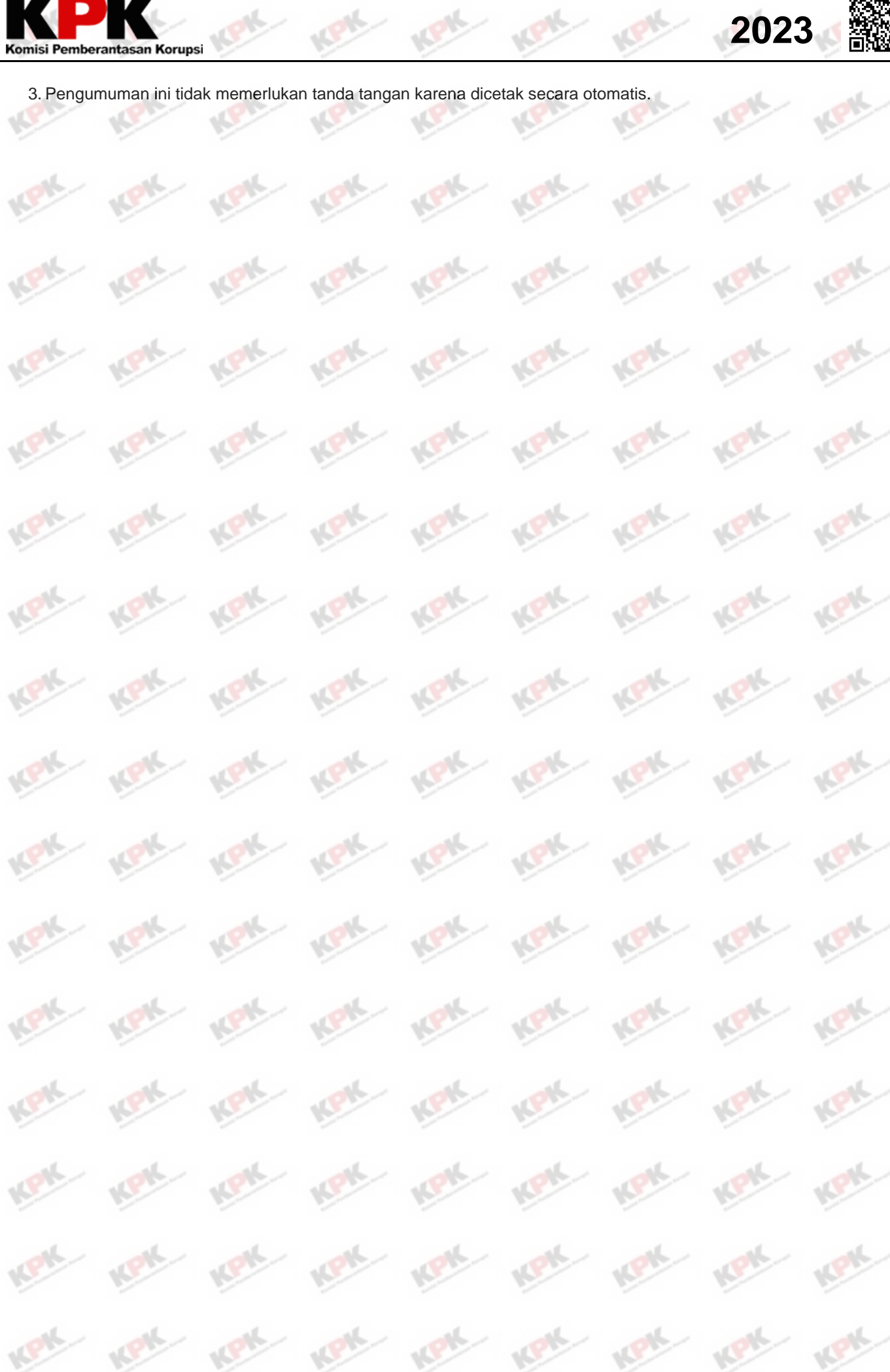
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 423.769.630

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : **NOFIENTI**
- Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
- NHK : **740937**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **385.000.000**

- Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **309.500.000**

- MOTOR, YAMAHA YUPITER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- MOBIL, HONDA WRV RS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **10.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **4.000.000**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **708.500.000**

**III. HUTANG** Rp. **365.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **343.500.000**

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Yth. Sdr **SUGIYOK**

BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: SUGIYOK
<b>Jabatan</b>	: BENDAHARA - BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA - : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
<b>Bidang</b>	: EKSEKUTIF
<b>Lembaga</b>	: BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 31 Desember 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

---

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**